

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN MANDIRI PARIWISATA BERBASIS KOMUNITAS: STUDI KASUS PANTAI MLARANGAN ASRI

Ihsanuddin^{1(a)}, Muhammad Salisul Khakim^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
^{a)}ih4nudd1n83@gmail.com, ^{b)}muhammad.salis@unisayoga.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

06-08-2025

Diterbitkan Online:

31-03-2026

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat,
Pengelolaan Pariwisata,
Pariwisata Berbasis
Masyarakat, Pantai Mlarangan
Asri

Keywords:

Community Participation,
Tourism Management,
Community-Based Tourism,
Mlarangan Asri Beach

Corresponding Author:

ih4nudd1n83@gmail.com

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, Pantai Mlarangan Asri berkembang menjadi destinasi wisata yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tanpa keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pendanaan. Pengalaman Pokdarwis Mlarangan Asri menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak selalu membutuhkan intervensi struktural dari luar, melainkan dapat tumbuh dari kekuatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mandiri objek wisata Pantai Mlarangan Asri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari pengurus Pokdarwis, aparatur kalurahan, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tercermin dalam empat dimensi, yaitu pengambilan keputusan melalui forum musyawarah rutin, pelaksanaan operasional berdasarkan pembagian tugas dalam struktur Pokdarwis, pemanfaatan hasil secara adil melalui pendapatan parkir dan UMKM, serta evaluasi berkala yang melibatkan pengurus dan warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada anggaran pemerintah, namun tetap mampu menciptakan dampak positif dari aspek sosial, ekonomi, hingga kelembagaan komunitas. Penelitian ini secara teoretis berkontribusi dengan membuktikan bahwa pemberdayaan otonom komunitas, yang didasarkan pada modal sosial dan kapasitas kelembagaan lokal, merupakan model yang efektif untuk pengembangan pariwisata yang mandiri dan berkelanjutan.

ABSTRACT

In recent years, Mlarangan Asri Beach has developed into a tourist destination that is fully managed by the community through the Tourism Awareness Group (Pokdarwis) without direct involvement from the local government in terms of funding. The experience of Pokdarwis Mlarangan Asri shows that tourism development does not always require structural intervention from outside, but can grow from the strength of the local community. This study aims to describe and analyze the forms of community participation in the independent management of the Mlarangan Asri Beach tourist attraction. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The sources consist of Pokdarwis administrators, village officials, MSME actors, and the local community. The results of the study show that community participation is reflected in four dimensions, namely decision-making through regular deliberation forums, operational implementation based on the division of tasks within the Pokdarwis structure, fair utilization of results through parking and MSME revenues, and periodic evaluations involving administrators and residents. This study concludes that management is carried out independently without

dependence on government budgets, but is still able to create positive impacts in terms of social, economic, and community institutional aspects. This study contributes theoretically by proving that autonomous community empowerment, based on social capital and local institutional capacity, is an effective model for independent and sustainable tourism development.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v8i1.1360>

PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan pantai di Indonesia mengalami beragam model, mulai dari intervensi penuh pemerintah hingga pendekatan yang berbasis pada kemandirian masyarakat (Chamalinda & Rohma, 2023). Salah satu model yang semakin mendapatkan perhatian adalah pengelolaan mandiri, yakni pengelolaan kawasan wisata oleh komunitas lokal tanpa ketergantungan pada dana pemerintah (Syarifuddin, 2022). Model ini menekankan partisipasi aktif warga dalam seluruh aspek pengelolaan, mulai dari perencanaan, pembangunan fasilitas, hingga pengawasan operasional (Widari, 2020). Pendekatan ini sering dikaitkan dengan prinsip *Community-Based Tourism* (CBT), di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam memanfaatkan potensi wisata untuk kesejahteraan mereka sendiri (Habiba & Lina, 2023). Pengelolaan mandiri dinilai mampu meningkatkan rasa kepemilikan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan destinasi yang berkelanjutan karena berakar pada kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat (Aziz, 2022).

Menurut BPS (2024), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional memiliki garis pantai yang panjang, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo. Pemerintah daerah telah mendorong pengembangan desa wisata dan pengelolaan pantai berbasis masyarakat melalui pembentukan Pokdarwis dan kerja sama dengan kelompok lokal. Beberapa pantai, seperti Pantai Drini, Pantai Indrayanti, pantai parangtritis dan Pantai Glagah, dikelola melalui kolaborasi antara pemerintah desa, pelaku wisata, dan masyarakat. Namun, tidak semua destinasi mendapat dukungan fiskal atau regulatif secara optimal. Dalam situasi ini, munculnya inisiatif pengelolaan mandiri menjadi solusi alternatif yang berkembang secara organik. Kunjungan wisatawan ke pantai di DIY terus meningkat, menunjukkan adanya potensi ekonomi yang

besar jika dikelola secara inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata dari model pengelolaan mandiri ini adalah Pantai Mlarangan Asri yang berada di Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Pantai ini mulai dikembangkan pada tahun 2018 atas inisiatif warga tanpa intervensi dana pemerintah daerah. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Mlarangan Asri yang dibentuk secara swadaya. Dalam kurun waktu beberapa tahun, Pokdarwis berhasil membangun berbagai fasilitas seperti area parkir, mushola, toilet, gazebo, dan lapak UMKM. Selain itu, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci dari keberhasilan pengelolaan wisata ini. Menariknya, meskipun tidak mendapat dukungan langsung dari APBD, Pantai Mlarangan Asri mampu menunjukkan perkembangan signifikan dari segi jumlah kunjungan dan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.

Mempelajari pengelolaan mandiri pariwisata atau *Community Based Tourism* (CBT) adalah hal krusial karena pendekatan ini merupakan kunci menuju pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Konsep ini menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama, berbeda dari model pariwisata massal yang sering kali mengeksploitasi sumber daya lokal tanpa memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan komunitas. Argumen ini diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan bagaimana CBT menjadi instrumen efektif dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Salah satu argumen utama adalah bahwa pengelolaan mandiri pariwisata secara signifikan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan menjadi pelaku utama dalam industri pariwisata, masyarakat memiliki kendali atas pendapatan dan distribusi keuntungan. Mereka tidak lagi bergantung pada operator tur besar,

melainkan mengelola homestay, layanan pemandu, dan UMKM mereka sendiri. Penelitian oleh Sukmono menunjukkan bahwa desa-desa wisata yang menerapkan model pengelolaan mandiri di Indonesia mengalami peningkatan pendapatan per kapita dan diversifikasi mata pencaharian (Sukmono, 2023). Selain itu, Li dalam penelitiannya menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan manajemen pariwisata berhubungan positif dengan peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan di destinasi pedesaan (Li, 2020).

Selain itu, pengelolaan mandiri pariwisata juga berfungsi sebagai strategi efektif untuk melestarikan budaya dan lingkungan. Ketika masyarakat lokal mengelola destinasi mereka sendiri, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menjaga warisan budaya dan keindahan alam. Mereka adalah penjaga pertama dari adat istiadat, kearifan lokal, dan ekosistem. Yudhistira & Mulasari dalam Jurnal Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik menyoroti bagaimana kesuksesan desa wisata di Bali sangat bergantung pada komitmen masyarakat untuk melestarikan ritual dan tradisi mereka, yang pada akhirnya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan (Yudhistira & Mulasari, 2021). Di kancah internasional, Sari dalam Journal of Sustainable Tourism menemukan bahwa inisiatif pariwisata berbasis masyarakat di Thailand mampu mengurangi kerusakan lingkungan dan mempromosikan praktik pariwisata yang lebih ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan konservasi energi, karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab langsung terhadap aset alam mereka (Sari, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun dari BPS secara nasional jumlah wisatawan nusantara yang mengunjungi Kulon Progo pada tahun 2024 sebanyak **733.032** pengunjung yang di kelola oleh Pemerintah daerah.

Tabel 1. Data Kunjungan Pariwisata Kulon progo

No	Nama Obyek Wisata Dikelola Pemerintah	Jumlah Pengunjung Wisata pada Objek Wisata yang Dikelola Pemerintah Daerah di Kabupaten Kulon Progo		
		2022	2023	2024
1	Pantai Glagah	606.500	682.323	567.036
2	Pantai Trisik	13.284	23.133	3.305
4	Waduk Sermo	101.603	75.799	33.753
5	Pantai Congot	79.523	115.075	113.714
6	Goa Kiskendo	7.474	6.998	2.696
7	Puncak Suroloyo	9.461	10.649	8.300
8	Kawasan Menoreh	6.873	5.733	461
9	Kawasan Jatimulyo	41.793	22.817	1.167
10	Wisata Alam Tritis	2.329	641	2.600
11	Wisata Alam Nglinggo	25.934	200	0
JUMLAH		894.774	943.368	733.032

Sumber: <https://kulonprogokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM0IzI=/banyaknya-pengunjung-dan-pendapatan-daya-tarik-wisata-pada-objek-wisata-yang-dikelola-pemerintah-daerah-di-kabupaten-kulon-progo.html>.

Secara Keseluruhan di Kulon Progo: Data BPS pada Tabel 1.1 menunjukkan tren kunjungan di objek wisata yang dikelola pemerintah daerah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024. Total pengunjung turun dari 943.368 pada tahun 2023 menjadi 733.032 pada tahun 2024, padahal pada tahun 2023 kunjungan sempat naik dari tahun 2022.

Berbanding terbalik dengan data BPS pada Tabel 1.1 menurut data internal Pokdarwis Mlarangan Asri, pada Tabel 1.2 berikut menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kunjungan di Pantai Mlarangan Asri naik secara konsisten, dari 136.439 di tahun 2022 hingga mencapai 262.183 di tahun 2024. Berikut Data kunjungan Wisata Mlarangan Asri.

Tabel 2. Data Kunjungan Wisata Pantai Mlarangan Asri Kalurahan Pleret Kapanewon Panjatan Kab Kulon Progo

BULAN	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Januari	15.740	17.977	22.602
Februari	10.257	12.826	23.722
Maret	10.950	15.584	17.047
April	5.157	25.029	37.569
Mei	25.919	17.075	24.435
Juni	11.164	18.538	23.367
Juli	10.876	17.340	17.340
Agustus	11.728	15.133	15.133
September	8.276	16.685	16.685
Oktober	8.021	16.413	17.413
November	5.500	17.749	19.803
Desember	12.851	34.290	27.067
Jumlah	136.439	224.639	262.183

Sumber : Pokdarwis Mlarangan Asri, 2025

Terdapat perbedaan mencolok antara data kunjungan yang dikelola pemerintah daerah dan yang dikelola oleh Pokdarwis Mlarangan Asri. Secara umum, data BPS menunjukkan tren penurunan kunjungan di tahun 2024, sementara Pantai Mlarangan Asri justru mengalami pertumbuhan yang kuat.

Hal ini mengindikasikan bahwa model pengelolaan wisata berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh Pokdarwis Mlarangan Asri menjadi salah satu motor penggerak penting dalam pariwisata Kulon Progo. Keberhasilan ini bisa menjadi inspirasi bagi destinasi lain untuk dikembangkan dengan pendekatan yang sama.

Lonjakan ini menandakan adanya pertumbuhan yang positif, baik dari sisi promosi, pengelolaan, maupun minat wisatawan terhadap destinasi tersebut. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat, khususnya Pokdarwis, dalam menjaga dan mengembangkan pantai sebagai destinasi wisata berbasis komunitas. Namun demikian, masih terdapat tantangan besar, seperti keterbatasan dana, aksesibilitas, infrastruktur, serta keterbatasan dukungan regulasi dari pemerintah daerah (Cahyani & Rochmiyati, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Mlarangan Asri sejalan dengan pendekatan CBT, karena masyarakat berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, sekaligus penerima manfaat dari kegiatan wisata. *Community-Based Tourism* menekankan pada keterlibatan aktif komunitas

lokal dalam seluruh tahapan pengelolaan destinasi, mulai dari identifikasi potensi, pembangunan fasilitas, hingga evaluasi program (Gautama et al., 2020). Hal ini tercermin pada cara kerja Pokdarwis Mlarangan Asri yang mengorganisasi kegiatan wisata secara mandiri sekaligus menjadikan warga sebagai aktor utama dalam musyawarah, kerja bakti, pengelolaan parkir, dan pengawasan kawasan. Menurut Rocca & Zielinski (2022), model ini mencerminkan prinsip CBT yang menekankan pemberdayaan lokal, kemandirian, serta pengelolaan yang berbasis nilai gotong royong dan kepemilikan kolektif.

Dalam konsep CBT, masyarakat berperan aktif dalam setiap tahap kegiatan pariwisata, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasilnya (Darmayanti & Oka, 2020). Model CBT menekankan pada peran komunitas lokal sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek (Satria & Aldi, 2023). Hal ini juga diperkuat oleh pandangan Ira & Muhamad (2024) yang menyebutkan bahwa CBT merupakan alat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya wisata secara partisipatif dan berkelanjutan.

Keterlibatan aktif masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis "Mlarangan Asri" tidak hanya terlihat dari aktivitas operasional harian, tetapi juga dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kegiatan. Dalam proses ini, dibutuhkan modal sosial yang kuat, seperti rasa saling percaya, kebersamaan, dan komitmen kolektif terhadap pengembangan

wisata (Schilke et al., 2021). Modal sosial ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan mandiri, terutama ketika dukungan struktural dari pemerintah belum optimal (Pancawati & Widaswara, 2023). Meski banyak penelitian sebelumnya telah mengangkat tema partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata, mayoritas penelitian tersebut lebih banyak membahas desa wisata yang mendapatkan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun program pendampingan. Penelitian Dewi & Khairan (2024) dan Nainggolan et al. (2024) menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat dominan dalam pengelolaan destinasi. Dalam kondisi tersebut, masyarakat biasanya terlibat karena didorong atau difasilitasi oleh perangkat desa atau dinas terkait.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini menyoroiti bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks yang benar-benar mandiri, tanpa intervensi langsung pemerintah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap dinamika internal Pokdarwis Mlarangan Asri, serta strategi dan tantangan yang mereka hadapi dalam membangun wisata pantai secara swadaya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur mengenai Community-Based Tourism (CBT) yang berbasis kemandirian masyarakat lokal, serta kontribusi praktis dalam merumuskan rekomendasi pengembangan wisata berkelanjutan yang berakar dari kekuatan komunitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk peran serta aktif yang dijalankan oleh Pokdarwis dalam pengelolaan mandiri Pantai Mlarangan Asri, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun tantangan dalam pelaksanaannya.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pengembangan pariwisata, meskipun umumnya terjadi dalam konteks desa wisata yang mendapat dukungan pemerintah, baik dari sisi regulasi, pendanaan, maupun infrastruktur. Penelitian ini menghadirkan kebaruan karena mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks yang benar-benar mandiri tanpa intervensi pemerintah, sebagaimana terjadi di Pantai Mlarangan Asri, sehingga memperkaya literatur tentang pengelolaan wisata berbasis komunitas secara swadaya.

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pendekatan Community-Based Tourism (CBT), yang menekankan keterlibatan aktif warga dari tahap perencanaan hingga evaluasi untuk mendorong pemberdayaan, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap destinasi wisata (Kusuma & Salindri, 2022). Model ini memungkinkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, autentik, dan berakar pada budaya lokal (Prasetyo & Syafrini, 2023). Pengelolaan Pantai Mlarangan Asri mencerminkan prinsip CBT tersebut, di mana masyarakat secara swadaya membangun fasilitas dan menjalankan kegiatan wisata berbasis gotong royong dan kesadaran kolektif (Riani, 2021).

Pengelolaan berbasis partisipasi mengutamakan keterlibatan warga dalam setiap tahap kegiatan wisata (Anugrah et al., 2021). Cohen dan Uphoff membaginya dalam empat dimensi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Abdalla et al., 2022). Keempat aspek ini dijalankan secara nyata oleh Pokdarwis Mlarangan Asri, melalui forum musyawarah, pembagian tugas harian, distribusi manfaat secara adil, dan evaluasi rutin. Partisipasi yang bermakna memperkuat legitimasi dan keberlanjutan destinasi wisata (Wang et al., 2021). Modal sosial mencakup nilai kepercayaan, norma gotong royong, dan jaringan sosial yang memperkuat kerja kolektif (Prayitno et al., 2023). Dalam sektor pariwisata, modal sosial mendorong komunitas mengelola wisata secara mandiri dan tangguh (Darmayanti & Oka, 2020). Pantai Mlarangan Asri menjadi contoh keberhasilan pembangunan wisata yang ditopang oleh solidaritas warga, kerja sama lintas kelompok, dan ketergantungan minimal terhadap bantuan luar (Andrighetto & Vriens, 2022).

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan CBT dengan fokus pada empat dimensi partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1977). Dimensi tersebut menjadi dasar untuk mengamati bagaimana peran aktif masyarakat, khususnya Pokdarwis, dalam pengelolaan mandiri Pantai Mlarangan Asri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara spesifik bentuk-bentuk partisipasi aktif yang diterapkan oleh Pokdarwis dalam mengelola Pantai Mlarangan Asri secara mandiri, dengan fokus pada implementasi empat dimensi

partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, maupun evaluasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mandiri Pantai Mlarangan Asri oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial yang kompleks dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas tanpa intervensi langsung dari pemerintah (Anugrah et al., 2021). Lokasi penelitian berada di Kalurahan Pleret, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, dan dilakukan pada Januari–Februari 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pengurus Pokdarwis, aparatur kalurahan, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat, yang dipilih secara purposif menggunakan panduan semi-terstruktur. Teknik purposif dipilih karena mendorong peneliti untuk menentukan informan secara selektif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan relevansi mereka terhadap fokus penelitian (Sugiyono, n.d.).

Verifikasi data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi antara observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

Triangulasi adalah sebuah teknik yang sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keabsahan dan keandalan data. Secara sederhana, triangulasi adalah strategi validasi yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk meneliti fenomena yang sama (Alfansyur & Mariyani, 2020). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, akurat, dan mendalam, sekaligus mengurangi bias yang mungkin muncul dari satu pendekatan tunggal. Dengan menguatkan temuan melalui perbandingan silang, peneliti bisa membangun argumen yang lebih kuat dan kredibel (Susanto et al., 2023).

Ada empat jenis triangulasi utama yang sering digunakan:

- a) Triangulasi Metode: Melibatkan penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data misalnya, menggabungkan wawancara, observasi, dan survei untuk menguji konsistensi temuan.
- b) Triangulasi Sumber Data: Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda,

seperti mewawancarai siswa, guru, dan orang tua tentang satu masalah yang sama.

- c) Triangulasi Peneliti: Melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk meminimalkan bias pribadi.
- d) Triangulasi Teori: Menggunakan beberapa kerangka teori yang berbeda untuk menganalisis data, yang membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif.

Teknik ini menjadi landasan penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti tidak hanya menemukan data, tetapi juga memverifikasi dan memperkaya makna di balik data tersebut (Mekarisce, 2020).

Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terhadap aktivitas pengelolaan dan dokumentasi seperti struktur organisasi, laporan kegiatan, serta foto lapangan. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung etika penelitian, seperti pemberian *informed consent*, perlindungan identitas narasumber, serta jaminan validitas dan kejujuran data. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran partisipatif Pokdarwis dalam pengelolaan wisata yang mandiri dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Pokdarwis, pedagang, masyarakat sekitar, dan Pemerintah Kalurahan Pleret, ditemukan bahwa pengelolaan Pantai Mlarangan Asri dilakukan secara mandiri oleh Pokdarwis Mlarangan Asri dengan keterlibatan aktif masyarakat. Struktur organisasi Pokdarwis terdiri dari berbagai seksi seperti keamanan, kebersihan, promosi, pengembangan usaha, dan kesehatan. Struktur ini dibentuk untuk membagi tanggung jawab secara terorganisir agar operasional pengelolaan pantai berjalan efektif. Dalam hal pengambilan keputusan, proses dilakukan secara musyawarah melalui rapat rutin bulanan dan koordinasi lintas seksi (ketua pokdarwis). Keputusan strategis seperti pembangunan fasilitas (toilet, pendopo, mushola) dan pengaturan lapak dagang selalu dibahas bersama. Gagasan bisa muncul dari ketua seksi maupun aspirasi masyarakat dan pengunjung (ketua pokdarwis). Misalnya, keinginan untuk menambah spot foto atau

fasilitas listrik sudah berkali-kali disampaikan dalam forum rapat (pedagang). Keinginan tersebut seharusnya bisa terelisasi supaya menarik pengunjung lebih Bayak sehingga bisa menambah pendapatan pedagang.

Tabel 3. Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Instansi/Jabatan
1	R Widoyoko A.md.	Kades/Kabag Kalurahan pleret, Panjatan
2	Resmi Widarti	Pengurus Pokdarwis
3	Supriyadi S.Pd.i	Masyarakat
4	Joko Suwito	Masyarakat
5	Fitrianto Wibowo	Masyarakat
6	Fahmi Handika	Masyarakat
7	Sri Pujiyanti	Masyarakat
8	Pedagang	Pedagang Pedagang

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pokdarwis telah memiliki jadwal tertulis dan pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota bertanggung jawab atas perannya masing-masing, seperti parkir, keamanan, hingga kebersihan(ketua pokdarwis). Jika ada anggota yang tidak hadir tanpa alasan, maka dikenakan sanksi berupa denda konsumsi(ketua Pokdarwis). Pelaksanaan kerja bakti dilakukan secara rutin satu bulan sekali, dan seluruh warga termasuk pedagang dilibatkan dalam kegiatan bersih pantai maupun penataan kawasan(ketua pokdarwis). Manfaat dari pengelolaan ini sangat dirasakan oleh warga, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari berdagang, mengelola parkir, hingga menjual hasil laut. Pembagian hasil parkir misalnya dilakukan dengan skema 70% untuk petugas, 30% untuk kas Pokdarwis (ketua pokdarwis). Secara sosial, adanya pantai yang tertata meningkatkan kebanggaan warga, mempererat kebersamaan, dan menciptakan ruang publik yang produktif.

Pada aspek evaluasi, Pokdarwis mengadakan rapat bulanan untuk membahas keluhan dan saran dari pengunjung maupun internal anggota. Misalnya, kritik tentang ketidakteraturan pelaksana parkir ditanggapi dengan keputusan bahwa pelaksana diprioritaskan dari warga yang kurang sejahtera (kordinator Parkir). Evaluasi juga dilakukan dua kali setahun dalam forum besar yang melibatkan seluruh pengurus dan pelaku usaha(ketua Pokdarwis). Namun, Pokdarwis

juga menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan akses listrik, abrasi, sampah laut yang terus datang, dan belum optimalnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD)(ketua Pokdarwis). Beberapa pedagang dan warga mengeluhkan kondisi kebersihan di musim hujan. Meski demikian, Pokdarwis tetap konsisten melakukan patroli malam dan komunikasi terbuka dengan warga sebagai strategi penanganan(pedagan).

Dukungan dari Pemerintah Kalurahan lebih banyak bersifat non-finansial, seperti pemberian izin acara dan dukungan administratif. Meskipun pemerintah menyadari pentingnya peran Pokdarwis, alokasi APBDes masih sangat terbatas, dan kontribusi finansial pantai terhadap PAD belum signifikan(Aparatur Kalurahan). Pendapatan Asli Desa dinilai sangat penting supaya kontribusi dari pengelolaan wisata Pantai Mlarangan Asri bisa Dirasakan Semua warga kalurahan Pleret Pada umumnya Yang selama ini masih dirasakan Oleh Anggota pokdarwis aktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis Mlarangan Asri merupakan contoh konkret dari penerapan konsep *CBT* yang berhasil diterapkan di wilayah pesisir. Konsep *CBT* menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata. Dalam konteks ini, keberadaan Pokdarwis tidak hanya sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai wadah aspirasi, perencana kegiatan, pelaksana program, serta pengelola sumber daya. Secara keseluruhan, Pokdarwis berperan sebagai motor penggerak pembangunan wisata lokal berbasis kemandirian dan gotong royong.

Analisis dilakukan dengan mengacu pada empat dimensi partisipasi masyarakat (Cohen & Uphoff, 1977), yang mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan utama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal di Pantai Mlarangan Asri menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan pariwisata mandiri. Analisis data memperlihatkan bahwa partisipasi yang terjadi tidak hanya sebatas keterlibatan fisik, melainkan mencakup peran strategis dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan perumusan kebijakan. Hasil ini mengindikasikan bahwa motivasi utama komunitas bukan hanya keuntungan finansial, tetapi juga didasari oleh

modal sosial dan rasa kepemilikan yang kuat terhadap destinasi wisata mereka. Dengan adanya forum musyawarah yang aktif, masyarakat secara kolektif mampu mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan.

Meski temuan tersebut menguatkan model pariwisata berbasis komunitas, analisis kritis lebih lanjut mengungkap beberapa tantangan. Salah satunya adalah pertanyaan tentang inklusivitas. Walaupun partisipasi tergolong tinggi, penelitian seharusnya mengupas lebih dalam apakah keterlibatan tersebut benar-benar merangkul semua lapisan masyarakat, atau hanya didominasi oleh tokoh-tokoh tertentu. Hal ini penting untuk dianalisis karena, menurut (Li, 2020) dalam *Tourism Management*, partisipasi yang tidak adil dapat menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan di dalam komunitas (Li, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih komprehensif jika menyajikan data tentang keterwakilan perempuan, pemuda, dan kelompok ekonomi lemah dalam struktur pengelolaan.

Selain itu, temuan mengenai peningkatan ekonomi perlu dikaitkan dengan aspek keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pendapatan, namun apakah keuntungan tersebut didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota komunitas. Sukmono dalam penelitian mereka di desa wisata Indonesia menemukan bahwa tanpa mekanisme pembagian yang jelas, kesenjangan ekonomi justru bisa melebar (Sukmono, 2023). Oleh karena itu, temuan tentang Pantai Mlarangan Asri perlu dilengkapi dengan data rinci tentang alokasi keuntungan. Terakhir, keberhasilan pariwisata harus sejalan dengan tanggung jawab lingkungan. Sebagaimana disoroti oleh Sari keberlanjutan suatu destinasi sangat bergantung pada kesadaran dan praktik konservasi (Sari, 2022). Hasil penelitian ini akan menjadi lebih kuat jika menyajikan temuan mengenai bagaimana komunitas Pantai

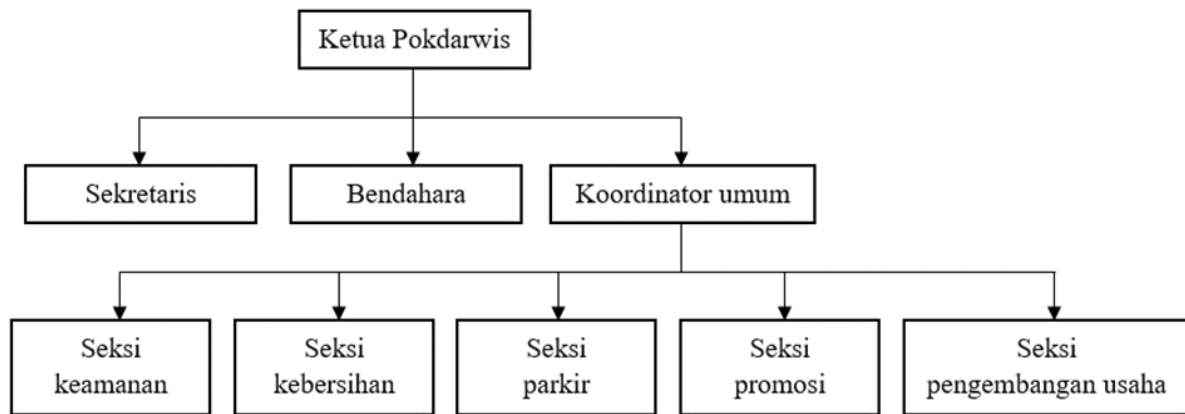
Mlarangan Asri mengelola isu-isu seperti sampah, erosi, dan dampak kunjungan massal terhadap ekosistem.

Tujuan analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana prinsip partisipatif tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata. Menurut hasil penelitian, berikut adalah uraian dari masing-masing dimensi tersebut:

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Empat dimensi partisipasi masyarakat sebagaimana dirumuskan oleh Cohen & Uphoff (1977) yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi terimplementasi secara utuh dalam praktik Pokdarwis Mlarangan Asri. Dalam dimensi pengambilan keputusan, Pokdarwis membangun mekanisme musyawarah rutin yang melibatkan ketua, pengurus seksi, serta masyarakat terdampak, seperti pedagang dan warga sekitar (ketua Pokdarwis). Keputusan pembangunan fasilitas, penataan kawasan, hingga pengaturan jam operasional selalu melalui forum bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang partisipasi tidak bersifat elitis, melainkan terbuka bagi semua elemen. Proses ini juga menunjukkan bentuk nyata dari *deliberative governance* di tingkat komunitas (Shin, 2021). Model partisipasi dalam pengambilan keputusan yang dijalankan Pokdarwis Mlarangan Asri, di mana semua pihak terdampak dilibatkan, menjadi bukti bahwa ruang partisipasi tidak elitis. Hal ini merupakan pondasi penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program di tingkat lokal.

Pada aspek pelaksanaan, Pokdarwis membentuk sistem kerja yang efisien dengan struktur organisasi yang rapi. Pembagian peran dalam seksi-seksi seperti keamanan, kebersihan, parkir, promosi, dan pengembangan usaha memudahkan koordinasi operasional di lapangan (ketua Pokdarwis) yang divisualisasikan melalui bagan berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pokdarwis “Mlarangan Asri”

Sumber: Pokdarwis Mlarangan Asri, 2025

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat tidak hanya simbolik. Anggota aktif menjalankan tugas harian, menjaga kebersihan, mengatur parkir, dan melayani pengunjung secara langsung. Rotasi tugas, sanksi administratif, dan kerja bakti rutin setiap seminggu sekali menjadi bagian dari disiplin kolektif yang terbentuk secara organik. Di sinilah terlihat bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan emosional dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai seperti tanggung rasa, gotong royong, dan “rukun” menjadi fondasi kuat dalam pengelolaan tersebut.

Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Dimensi pemanfaatan hasil juga tidak kalah penting. Pengelolaan pantai memberi dampak ekonomi nyata bagi warga. Sistem pembagian hasil parkir (70:30)(Kordinator Parkir), akses berdagang bagi UMKM, serta peluang kerja bagi warga yang kurang mampu adalah bukti dari prinsip pemerataan dan keadilan sosial yang dijalankan Pokdarwis(seksi Keamanan). Saat ini, terdapat sekitar 27 pelaku UMKM yang aktif berjualan di kawasan pantai, mencakup berbagai jenis usaha seperti kuliner lokal (mie ayam, bakso, es degan), hasil laut segar, minuman kemasan, kerajinan tangan serta persewaan tikar, pelampung serta *Motor sport*, wahana permainan Anak dan lain-lain(Bedahara pokdarwis).

Pengelolaan secara Mandiri menambah rasa kebanggaan yang kolektif berlebih terhadap destinasi yang dibangun sendiri dan menciptakan semangat menjaga dan memajukan pantai secara berkelanjutan(ketua pokdarwis). Rasa memiliki ini sejalan dengan prinsip utama CBT yang menekankan

empowerment dan *ownership*. Ini juga mengindikasikan adanya pembentukan modal sosial yang kuat berupa *bonding capital* antarsesama warga yang mempererat solidaritas komunitas.

Partisipasi dalam Evaluasi

Evaluasi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan dan responsivitas pengelolaan. Evaluasi bulanan dan dua tahunan dilakukan secara rutin, membahas berbagai isu seperti ketertiban pelaksana parkir, pengaduan pengunjung, serta permasalahan internal lainnya(ketua Pokdarwis). Proses evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi forum belajar dan perbaikan. Sebagai contoh, kritik mengenai penempatan tusuk sate dan sampah laut langsung ditindaklanjuti melalui forum warga dan kerja bakti(ketua pokdarwis). Hal ini mencerminkan kapasitas adaptif yang tinggi dalam organisasi berbasis komunitas. Proses belajar ini disebut sebagai *collective learning*, yang memungkinkan organisasi berkembang berdasarkan pengalaman dan refleksi bersama.

Tantangan dan Harapan Pengelolaan Mandiri

Keberhasilan pengelolaan tidak lepas dari tantangan yang cukup kompleks. Pertama, tantangan struktural berupa keterbatasan anggaran dan belum tersedianya dukungan fiskal dari APBDes membuat pengembangan fasilitas bergantung penuh pada swadaya masyarakat dan hasil parkir(ketua Pokdarwis). Hal Ini menjadi tantangan serius mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur wisata yang membutuhkan dana besar.

Kedua, masalah lingkungan seperti abrasi, sampah kiriman laut, dan keterbatasan listrik memperlihatkan betapa kondisi alam dan minimnya infrastruktur dasar masih menghambat optimalisasi pelayanan wisata. Ketiga, dinamika sosial seperti ketidaktertiban pedagang atau pelaksana parkir yang kurang disiplin menjadi isu internal yang terus memerlukan pendekatan persuasif dan komunikatif (Ketua Pokdarwis).

Meskipun demikian, Pokdarwis berhasil menjawab tantangan tersebut melalui kekuatan modal sosial yang tinggi. Modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kolektif menjadi sumber daya utama dalam pengelolaan komunitas. Dalam hal ini, kepercayaan antarpengurus, komunikasi yang cair, serta nilai solidaritas menjadi alat tukar yang menggantikan peran formal kelembagaan. Ini adalah bukti bahwa keberhasilan suatu pengelolaan tidak semata-mata ditentukan oleh kuatnya dukungan negara, tetapi bisa tumbuh dari kekuatan masyarakat itu sendiri.

Pokdarwis juga memperlihatkan kapasitas untuk membangun jejaring luar (*bridging capital*) dengan komunitas pemancing, grup senam, serta masyarakat dari luar Kalurahan. Kegiatan promosi dilakukan tidak hanya oleh seksi promosi, tetapi juga oleh warga melalui media sosial pribadi. Ini memperluas jangkauan pengunjung dan menunjukkan bahwa promosi digital sudah mulai dipahami sebagai instrumen penting dalam ekosistem pariwisata masa kini. Fenomena ini menekankan bahwa keterlibatan aktif komunitas mampu menciptakan inovasi lokal dan memperluas jaringan sosial secara horizontal.

Pada sisi lain, hubungan vertikal (*linking capital*) dengan Pemerintah Kalurahan masih terbatas. Pemerintah Kalurahan belum banyak memberikan dukungan dalam bentuk anggaran atau program pembinaan. Namun demikian, legalitas keberadaan Pokdarwis dan dukungan administratif telah menjadi bentuk pengakuan kelembagaan yang sangat berarti. Pokdarwis tetap mempertahankan semangat mandiri dan tidak tergantung pada struktur birokrasi, meskipun tetap berharap adanya sinergi dalam bentuk dukungan kebijakan dan pendampingan teknis di masa mendatang.

Temuan bahwa pengelolaan organisasi nirlaba dapat dilakukan secara mandiri, terlepas dari ketergantungan pada anggaran pemerintah, memiliki implikasi signifikan terhadap teori administrasi publik. Hal ini secara fundamental

mengkritisi model *Old Public Administration* (OPA) yang sentralistis dan berorientasi pada birokrasi negara sebagai satu-satunya penyedia layanan publik. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai publik tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah.

Sebaliknya, temuan ini konsisten dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mendorong efisiensi dan inovasi melalui pendekatan yang berorientasi pasar, serta paradigma *New Public Service* (NPS) yang menekankan pentingnya kolaborasi dan jaringan dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan dalam menciptakan dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara mandiri mengindikasikan bahwa model tata kelola hibrida, yang menggabungkan efisiensi manajerial dengan tujuan sosial, merupakan strategi yang efektif untuk melayani publik di era kontemporer.

Lebih lanjut, temuan mengenai konsistensi dalam penerapan empat dimensi partisipasi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi memberikan validasi empiris yang kuat terhadap kerangka teoretis (NPS).

Studi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terstruktur dan substantif, seperti yang didefinisikan oleh Cohen dan Uphoff, bukan hanya sekadar konsep ideal, melainkan praktik yang dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendorong keberlanjutan dan akuntabilitas. Musyawarah rutin dan distribusi manfaat yang adil mencerminkan prinsip NPS bahwa warga negara adalah aktor utama dan bukan sekadar penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman bahwa pemberdayaan komunitas melalui partisipasi yang otentik merupakan mekanisme krusial dalam administrasi publik untuk membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat kohesi sosial, dan pada akhirnya, menciptakan layanan publik yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa Pantai Mlarangan Asri merupakan model praktik baik dari pengelolaan pariwisata berbasis komunitas yang sukses secara mandiri. Model ini menawarkan pembelajaran bahwa kekuatan komunitas bisa mengisi kekosongan peran negara, membangun kelembagaan sosial berbasis budaya lokal, dan menciptakan destinasi wisata yang inklusif dan

berkelanjutan. Model ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain yang memiliki karakter sosial serupa, dan bisa direplikasi dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

PENUTUP

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Mlarangan Asri telah menunjukkan peran yang sangat aktif dan mandiri dalam mengelola destinasi wisata ini, sebuah model yang patut dicontoh karena tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Keberhasilan ini tidak lepas dari praktik pengelolaan yang sangat partisipatif dan inklusif. Dalam hal pengambilan keputusan, misalnya, Pokdarwis secara rutin mengadakan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, memastikan bahwa setiap kebijakan, dari penataan area hingga pengembangan fasilitas, dibuat berdasarkan kesepakatan kolektif. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara anggota. Selanjutnya, dalam pelaksanaan operasional, mereka menerapkan pembagian kerja yang jelas, memungkinkan setiap anggota memiliki peran spesifik, termasuk dalam hal promosi wisata yang kini dilakukan secara kreatif melalui media sosial oleh para pemuda setempat.

Aspek krusial lainnya adalah pengambilan manfaat yang dilakukan secara adil. Hasil pendapatan dari pengelolaan wisata tidak hanya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, tetapi juga didistribusikan secara transparan dan merata, bahkan kepada kelompok rentan seperti perempuan dan pelaku UMKM yang terlibat langsung. Praktik ini tidak hanya menciptakan dampak ekonomi yang positif, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Terakhir, melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Pokdarwis mampu mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan berkelanjutan, menjadikan pengelolaan wisata ini semakin efektif dari waktu ke waktu.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana, minimnya infrastruktur yang memadai, dan belum optimalnya dukungan dari pemerintah kalurahan, Pokdarwis mampu mengatasi hambatan tersebut berkat kekuatan modal sosial yang tinggi. Solidaritas warga dan semangat gotong royong menjadi pendorong utama yang membuat mereka mampu mandiri. Secara keseluruhan, Pantai Mlarangan Asri menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pariwisata

yang berkelanjutan dapat tumbuh dari inisiatif lokal, dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan tata kelola yang partisipatif. Model pengelolaan seperti ini sangat berpotensi untuk direplikasi di wilayah lain yang memiliki karakter sosial serupa, demi mendorong pembangunan wisata yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Pokdarwis disarankan untuk memperkuat tata kelola partisipatif melalui dokumentasi yang lebih formal, meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran digital, serta membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta atau universitas untuk mengatasi keterbatasan dana dan infrastruktur. Selain itu, promosi digital yang sudah berjalan perlu ditingkatkan dengan strategi yang lebih terstruktur.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena lebih berfokus pada dimensi internal Pokdarwis dan kurang mendalami aspek eksternal yang vital. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengatasi keterbatasan ini dengan melakukan pengukur secara kuantitatif dampak ekonomi dari pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal melalui survey, studi Peran Pemerintah: Menganalisis peran dan pandangan pemerintah daerah terhadap inisiatif lokal ini, analisis Strategi Pemasaran: Melakukan analisis mendalam terhadap efektivitas media sosial yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, F. H., Samah, A. A., Hashim, A. H., & Rosnon, M. R. (2022). Relationship between Participation and Women Empowerment in the Tourism Industry; a Structural Equation Modeling Approach. *South Asian Research Journal of Business and Management*, 4(1), 11–27. <https://doi.org/10.36346/sarjbm.2022.v04i01.002>
- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Andrighetto, G., & Vriens, E. (2022). A research agenda for the study of social norm change. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical,*

- Physical and Engineering Sciences*, 380(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1098/rsta.2020.0411>
- Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 6(4), 775–789.
<https://doi.org/10.28926/briliant.v6i4.689>
- Aziz, M. H. (2022). Model Pariwisata Digital dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2279–2286.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2246>
- BPS. (2024). *Perkembangan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Juli 2024*.
- Cahyani, M. D., & Rochmiyati, S. (2023). Pemanfaatan Pantai Mlarangan Asri Sebagai Sumber Belajar Bahasa Indonesia Kelas IV Pada Materi Teks Deskripsi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 4555–4569.
- Chamalinda, K. N. L., & Rohma, F. F. (2023). Contribution Regional Tax and Retributions in the Tourism Sector. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 140–148.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation*. Cornell University.
- Darmayanti, P. W., & Oka, I. M. D. (2020). Implikasi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Bagi Masyarakat Di Desa Bongan. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2), 142–150.
<https://doi.org/10.22334/jihm.v10i2.167>
- Dewi, R. I., & Khairan, W. (2024). Peran Pemerintah Desa Sedau dalam Pengembangan Destinasi Wisata Gunung Jae. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 11(01), 18–26.
- Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 355–369.
<https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414>
- Habiba, M., & Lina, F. Y. (2023). Community-Based Tourism (CBT): A Community Development Tool. *European Journal of Business and Management*, 15(17), 1–9.
<https://doi.org/10.7176/ejbm/15-17-01>
- Ira, W. S., & Muhamad. (2024). Partisipasi Masyarakat pada Penerapan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang). *Jurnal Pariwisata Terapan*, 3(2), 124–135.
- Kusuma, P. A., & Salindri, Y. A. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Wisata Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Journal Of Tourism And Economic*, 5(1), 46–62.
<https://doi.org/10.36594/jtec/2nn36580>
- Li, J. (2020). Community Participation in Tourism Development and Its Impact on Rural Livelihoods". *Tourism Management*, 81, 104169.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Nainggolan, C. R. A., Fitriyah, & Supratiwi. (2024). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 568–582.
- Pancawati, N. L. P. A., & Widaswara, R. Y. (2023). Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 166–178.
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.1398>
- Prasetyo, D. A., & Syafrini, D. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di

- Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 47–57.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i1.721>
- Prayitno, G., Auliah, A., Ari, I. R. D., Effendi, A., Hayat, A., Delisa, A., Siankwilimba, E., & Hiddlestone-Mumford, J. (2023). Social capital for sustainable tourism development in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 1–23.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2293310>
- Riani, N. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469–1474.
- Rocca, L. H. D., & Zielinski, S. (2022). Community-based tourism, social capital, and governance of post-conflict rural tourism destinations: the case of Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. *Tourism Management Perspectives*, 43(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2022.100985>
- Sari, A. (2022). The Role of Community-Based Tourism in Environmental Conservation: A Case Study in Thailand". *Journal of Sustainable Tourism*, 30(5), 987–1002.
- Satria, A., & Aldi, T. (2023). Analisis Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Sektor Pariwisata: Perspektif Ekonomi Lingkungan di Destinasi Wisata. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.61787/0vgy2953>
- Schilke, O., Reimann, M., & Cook, K. S. (2021). Trust in Social Relations. *Annual Review of Sociology*, 47(1), 239–259.
<https://doi.org/10.1146/annurev-soc-082120-082850>
- Shin, B. (2021). Exploring Network Measures of Social Capital: Toward More Relational Measurement. *Journal of Planning Literature*, 36(3), 328–344.
<https://doi.org/10.1177/0885412221999415>
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmono, R. (2023). Peran Pengelolaan Berbasis Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Desa Wisata". *Jurnal Pariwisata Terapan*, 7(2), 112–125.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Syarifuddin, D. (2022). Model Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ciburial. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 111–129.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2298>
- Wang, M., Jiang, J., Xu, S., & Guo, Y. (2021). Community participation and residents' support for tourism development in ancient villages: The mediating role of perceptions of conflicts in the tourism community. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–16.
<https://doi.org/10.3390/su13052455>
- Widari, D. A. D. S. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoriti dan Empiris. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(1), 1–11.
- Yudhistira, I. G. A., & Mulasari, S. (2021). Strategi Pelestarian Budaya Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Bali". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 58–72.